



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pelajar No.3 Telp (0776) 322341 Dabo Singkep 29871
Website : <https://diskes.linggakab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA
NOMOR : 078/SK/DINKES-PPKB/I/2024

TENTANG

JENIS-JENIS PELAYANAN
DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka perlu dibuat Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga;
- b. bahwa berdasarkan tuntutan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka dianggap perlu untuk mengembangkan pelayanan agar dapat dijangkau setiap waktu oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan;
- c. bahwa pengembangan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau setiap waktu oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga setiap jam kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307 (Tambahan Lembar Negara Nomor 5612, LL Setneg : 36 hlm));
3. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5942);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga (Berita Negara republik Indonesia tahun 2011 Nomor 372);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1662);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Spesialistik di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1058);
 22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
 23. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/II/3166/2017 tentang Registrasi Puskesmas;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Lingga Nomor 126 Tahun 2022 tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023;
26. Surat Edaran Bupati Lingga Nomor 0603/YANKES-DKPPKB/440, tentang tindak lanjut hasil rapat validasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, Tanggal 20 Maret 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA.**
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga tentang Jenis-jenis pelayanan yang disediakan;
- KEDUA : Jenis-jenis pelayanan yang dimaksud dalam diktum kesatu perlu dilakukan sosialisasi secara lisan dan tulisan (brosur, leaflet, flyer, video, running text) kepada masyarakat secara kontinuitas melalui seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- KETIGA : Jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua adalah sesuai dengan lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Dabo Singkep
Pada tanggal : 17 Januari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LINGGA



dr. BUKIT TUA RAYANTO GULTOM
PEMBINA
NIP.19820723 200903 1005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LINGGA
NOMOR : 078/SK/DINKES-PPKB/I/2024
TANGGAL : 17 JANUARI 2024

Jenis-jenis pelayanan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga :

Jenis-Jenis Pelayanan	Waktu
<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Kepesertaan JKN KIS segmen PBI-APBD Kabupaten Lingga;2. Rekomendasi Permohonan Bantuan Pengobatan (Jamkesda Provinsi Kepri);3. Rekomendasi Izin Klinik;4. Rekomendasi Izin Laboratorium;5. Penanganan Pengaduan;6. Rekomendasi Registrasi Puskesmas;7. Rekomendasi Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis;8. Rekomendasi Izin Praktik Apoteker dan Asisten Apoteker;9. Rekomendasi Izin Praktik Perawat;10. Rekomendasi Izin Praktik Bidan;11. Rekomendasi Izin Praktik Petugas Laboratorium (Analisis);12. Rekomendasi Izin Praktik Petugas Rontgen Radiologi;13. Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapi;14. Rekomendasi Izin Praktik Penata Anestesi;15. Rekomendasi Izin Penyehat Tradisional;16. Rekomendasi Sertifikat Penjamah Makanan;17. Rekomendasi dan Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT);18. Rekomendasi Izin Apotek;19. Rekomendasi Sertifikat Operator, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU);20. Rekomendasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS);	SENIN – KAMIS, PUKUL 08.00 - 16.00 WIB JUMAT, PUKUL 08.00 - 15.30 WIB

Ditetapkan di : Dabo Singkep
Pada tanggal : 17 Januari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LINGGA



dr. BUKIT TUA RAYANTO GULTOM
PEMBINA
NIP.19820723 200903 1005